PERENCANAAN MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH MENGGUNAKAN FRAMEWORK ITPOSMO

Tati Mardiana
Komputerisasi Akuntansi
Staf Pengajar Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika Bandung (AMIK BSI Bandung)
Jl. Karapitan No. 98 Bandung
http://www.bsi.ac.id
tati.ttm@bsi.ac.id, tati.mardiana@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to present a project management planning of the of the local financial accounting information system (SIMAKDA) overall by using the framework ITPOSMO. The methodology used in this study based on the PMI process group. For data analysis used framework ITPOSMO, Work Breakdown Structure (WBS) and Microsoft Project software to design the project scheduling and cost estimates. First step in research is collect the data, primary and secondary data. This is done by using the method of field studies and literature study. Literature study carried out by studying books and liteatur related to research themes, whereas the field study conducted by the study of documents and interviews of the parties associated with the project SIMAKDA. The results of the study was a project can be run in accordance with the schedule and budget that has been determined and the Regional Financial Information System can be implemented properly. SIMAKDA Implementation is expected to increase the area of financial management so that the regional development goes well in order to improve public welfare Banjar area, East Kalimantan.

Keywords : project, local financial, SIMAKDA, ITPOSMO, WBS.

1. PENDAHULUAN

Akibat krisis moneter pada tahun 997, Pemerintah berusaha untuk melakukan reformasi di berbagai bidang. Salah satunya adalah dengan memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional untuk mengelola sumber-sumber ekonomis daerah secara mandiri dan bertanggung jawab. Pemberian otono mi daerah diharapkan agar pemerintahan daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat.

Pengelolaan sumber-sumber ekonomi berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah termasuk kabupaten atau kotamadya. Lahirnya Undang-Undang (UU) seperti yaitu UU nomor 17 Tahun 2003 dan UU nomor 1 Tahun 2004 menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan Negara. Peraturan tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan PP 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Abdul Hafiz, 2009). Disamping undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kepmedagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (pengganti dari Kepmendagri Nomor. 29 tahun 2002) yang telah direvisi oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 (Haryono, 2011). Semua peraturan tersebut pada intinya menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Siaran Pers BPK Tahun 2008, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam tiga tahun terakhir secara umum masih buruk. Hal ini dapat dilihat dari persentase LKPD periode 2004-2007 yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) semakin berkurang dari 7% pada tahun 2004 menjadi 5% pada tahun berikutnya dan hanya 1% pada tahun 2006 dan 2007. Sebaliknya, LKPD dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) semakin meningkat dari 2% pada tahun 2004 menjadi 17% pada tahun 2007 dan pada periode yang sama opini Tidak Wajar (TW) naik dari 3% menjadi 19% (Hafiz Tanjung, 2009).

Guna mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) mengembangkan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIMAKDA) yang akan memudahkan dalam penatausahaan keuangan daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah, yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas laporan keuangan yang dibutuhkan Pemda Kabupaten. Proyek SIMAKDA diharapkan memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih baik karena dapat menyajikan laporan Keuangan daerah secara akurat, handal dan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sejauh ini, pada umumnya tingkat keberhasilan proyek Teknologi Informasi (TI) masih rendah. Beberapa contoh kesulitan atau kegagalan dalam implementasi TI dapat dilihat, misalnya dari studi yang dilakukan, *Standish Group Study (CHAOS)* menemukan bahwa pada 1995 hanya 16,2% proyek TI yang sukses, sementara lebih dari 31,1 % proyek TI dibatalkan sebelum proyek rampung (Standish Group, 1995). Studi yang sama juga yang dilakukan *Conference Board Kanada* terhadap 117 perusahaan pada 2001 yang menunjukkan, 40% proyek TI gagal, dan 25% proyek TI melebihi budget (Rahmad dan Zaitun, 2008). Di Indonesia, Siskomdagri (Sistem Komunikasi Departemen Dalam Negeri) yang diluncurkan sekitar 1995-an merupakan salah contoh proyek *e-government* yang mengalami kegagalan meskipun telah didukung dana miliaran rupiah.

Faktor kegagalan proyek adalah tidak dilaksanakannya manajemen proyek TI termasuk implementasi *e-government* dengan tepat dan belum memenuhi harapan. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor antara lain: penggalian kebutuhan bisnis dan *user* (*requirement*) yang kurang lengkap, kurangnya keterlibatan *user* dalam

pengembangan sistem, kurangnya sumberdaya manusia proyek, harapan (*ekspektasi*) yang berlebihan dari pemilik proyek (*project owner*) terhadap kapabilitas sistem yang dibangun, kurangnya dukungan dari eksekutif atau manajemen perusahaan pemilik proyek, buruknya komunikasi antara pihak-pihak terkait baik pengembang maupun pemiliki proyek serta kurangnya pengendalian kualitas pekerjaan. Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah menyajikan perencanaan manajemen proyek SIMAKDA secara menyeluruh dengan menggunakan *framework* ITPOSMO.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen keuangan daerah adalah mencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif serta pelaporan tepat waktu (Akbar, 2002). Fungsi manajemen terbagi atas tiga tahapan utama yaitu : perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (pengawasan). Oleh karena itu fungsi manajemen keuangan daerah terdiri dari unsur-unsur pelaksanaan tugas yang terdiri dari :

a. Pengalokasian potensi sumber-sumber ekonomi daerah;
b. Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
c. Tolok ukur kinerja dan Standarisasi;
d. Pelaksanaan Anggaran yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi;
e. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kepala Daerah; dan
f. Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governnace*), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengeluarkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah.

2.2. Akuntansi Keuangan Daerah

Dalam struktur pemerintahan daerah, satuan kerja (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Proses pencatatan tersebut dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) dan pada akhir periode dari catatan tersebut PPK SKPD menyusun laporan keuangan untuk satuan kerja bersangkutan (Hafiz Tanjung, 2009).

Pada SKPKD yang dapat berupa Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) pencatatan transaksi-transaksi akuntansi diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

a. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja yaitu mencatat transaksi-transaksi keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada bagian atau biro yang ada pada BPKD.
b. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai pemerintah daerah untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan seperti pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pada akhir tahun penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

dilakukan dengan cara mengkonsolidasikan laporan keuangan dari setiap SKPD dengan laporan keuangan SKPKD yang prosesnya dikerjakan oleh fungsi akuntansi SKPKD. Laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan transaksi keuangan pada SKPD berupa : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan pada tingkat SKPKD laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan transaksi keuangan berupa : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.3. Proyek Sistem Informasi

Proyek sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan pemilu, proyek pembangunan infrastruktur *e-government* di kabupaten Takalar, Proyek pengembangan sistem CRM (*Customer Relationship Management*) di PT Garuda, proyek pembangunan sistem *e-business* pada PT. Global Jaya, dan lain-lain.

Beberapa perbedaan karakteristik proyek sistem informasi dibandingkan dengan proyek bidang lain adalah sebagai berikut:

a. Memiliki tujuan untuk menghasilkan produk yang bersifat *intangible* seperti perangkat lunak, database, jaringan yang sulit untuk mengukur nilai manfaat dari produk tersebut.
b. Melibatkan teknologi yang sangat cepat usang, karena perkembangan yang sangat cepat.
c. Membutuhkan beragam sumber daya manusia dengan keahlian dan kompetensi yang beragam.
d. Ukuran yang dijadikan standar sulit dibakukan, karena sulit mengukur kualitas yang dimengerti berbagai pihak secara seragam.

Proyek merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu terbatas dan dengan alokasi sumber daya tertentu untuk menghasilkan produk atau jasa yang unik sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Davidson, 2002:9). Sistem Informasi memiliki fungsi menghasilkan informasi-informasi yang dibutuhkan pihak *user*. Komponen yang termasuk sistem informasi meliputi infrastruktur *hardware*, *software* dan ketersediaan sumber daya manusia bidang TI.

Proyek sistem informasi mencakup sebagian atau keseluruhan dari rangkaian aktivitas rekayasa pembangunan sistem informasi. Contoh-contoh proyek sistem informasi antara lain :

2.4. Manajemen Proyek

Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, ketrampilan, alat bantu dan teknis-teknis pada aktivitas-aktivitas proyek agar persyaratan dan kebutuhan proyek terpenuhi (Heryanto dan Totok, 2009: 27). Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya manajemen proyek antara lain:

a. Efsiensi baik dari sisi biaya, sumber daya maupun waktu.
b. Monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan proyek menjadi lebih baik sehingga proyek dapat sesuai dengan *scope*, biaya, sumber daya dan waktu yang telah ditentukan.
c. Meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan.
d. Meningkatkan produktivitas dari masing-masing tim.
e. Dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.
f. Kondisi intenal tim proyek yang lebih baik.
g. Meningkatkan semangat, tanggung jawab serta loyalitas tim terhadap proyek dengan memberikan penugasan yang jelas kepada masing-masing anggota tim.

Setiap proyek memiliki tujuan khusus, didalam proses pencapaian tujuan tersebut ada tiga faktor pembatas yang harus dipenuhi yang dikenal dengan *Trade-off Triangle* atau *Triple Constrain* (Heryanto dan Totok, 2009: 29), yaitu:

a. Lingkup (*scope*)
   Scope atau lingkup proyek membahas jenis dan batasan-batasan yang ada pada sebuah proyek yang menjadi acuan dalam menyusun pekerjaaan proyek yang lebih detail dan menentukan waktu pengerjaan proyek.
b. Waktu (*Time*)
   Merupakan lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Semakin lama suatu proyek dikerjakan, maka semakin besar biaya operasional proyek yang dibutuhkan.
c. Biaya (*Cost*)
   Merupakan komponen biaya proyek. Komponen ini juga saling terkait dengan dua komponen sebelumnya (produk dan waktu) karena semakin besar lingkup proyek dan semakin lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek maka akan semakin besar biaya suatu proyek.

Idealnya, suatu proyek yang baik adalah proyek yang dapat selesai tepat waktu (*time*), sesuai dengan budget yang telah direncanakan sebelumnya (*cost*) dan lingkup pekerjaan yang disetujui (*scope*) sesuai dengan kualitas yang diharapkan atau ditentukan sebelumnya (*quality*).

Kerangka kerja (*framework*) memberikan strukur dasar untuk memahami manajemen proyek berdasarkan sembilan area pengetahuan manajemen proyek. Dimana *stakeholders* memiliki tujuan atau harapan yang dituangkan dalam sebuah proyek. Seorang Manajer Proyek akan memimpin dan mengelola proyek tersebut. Pengelolaan proyek meliputi kegiatan yang sesuai dengan area pengetahuan manajemen proyek yang menggunakan peralatan (*tools*), teknik dan metode terkait untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh *stakeholder*.

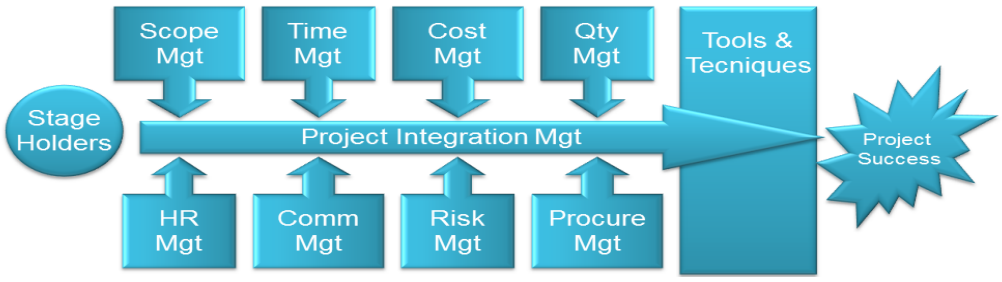

Sumber : Heryanto dan Totok, 2009:27

Gambar 1. Kerangka Kerja (*Framework*) Manajemen Proyek

2.5. *Framework* ITPOSMO

Seringkali terjadi adalah kesenjangan yang lebar antara realitas yang sekarang dihadapi dengan rancangan sistem informasi yang dimaksudkan untuk mengubah keadaan. Konsep kesenjangan atau lebih dikenal dengan *framework* ITPOSMO dikembangkan pertama kali oleh Richard Heeks (2003) (Arief, 2008). Framework ITPOSMO terdiri atas delapan aspek yang sangat berpengaruh dalam menyebabkan kegagalan pada proyek-proyek *e-government* di negara berkembang, yaitu: Informasi

(*Information*), Teknologi (*Technology*), Proses *(Processes*), Objektif dan Nilai (*Objectives and Values*), Staf dan Keahlian (*Staffing and Skills*), Sistem Manajemen dan Struktur Organisasi (*Management Systems and Structures*) dan Sumber daya yang lain (*Other Resources*). Pada konsep ini dilakukan pengukuran kesenjangan antara realita yang ada dengan desain dari sistem yang akan dibangun, pertimbangan utama dari framework ini adalah bahwa semakin besar kesenjangan antara realita dan desain maka semakin besar resiko bahwa proyek tersebut akan gagal. Jika kesenjangan tersebut dapat diperkecil maka resiko kegagalan dari suatu proyek *e-Government* dapat dikurangi.

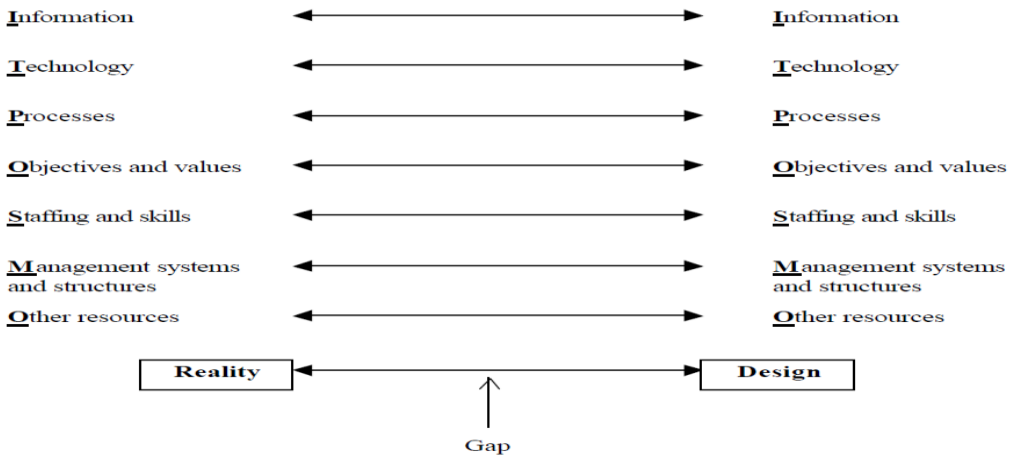

Sumber : Heeks, 2003 : 4

Gambar 2. *Framework* ITPOSMO

3. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan *PMI process group* (Heryanto dan Totok, 2009:49-56) yaitu inisiasi dan perencanaan proyek. Untuk analisis data digunakan *framework* ITPOSMO, *Work Breakdown Structure* (WBS) dan *software Microsoft Project* untuk merancang penjadwalan proyek dan estimasi biaya. Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data, baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode studi lapangan dan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari buku dan literatur yang berhubungan dengan tema penelitian, sedangkan studi lapangan dilakukan dengan cara studi dokumen dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan proyek SIMAKDA.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Inisiasi Proyek

Inisiasi proyek memberikan gambaran global sebuah proyek yang akan dikerjakan. Gambaran global ini biasanya berisi ruang lingkup, tujuan proyek, waktu proyek, biaya proyek, dan informasi umum lainnya yang dituangkan ke dalam bentuk dokumen definisi proyek yang akan menjadi bahan pegangan dan acuan dalam perencanaan manajemen proyek.

A. Tujuan Proyek

Proyek ini diharapkan akan membantu memudahkan penyelenggara pemerintah dalam penatausahaan keuangan daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat, DPRD dan Pemerintah Pusat, yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas laporan keuangan yang dibutuhkan Pemda Kabupaten/Kota.

B. Metode atau Pendekatan Proyek

Solusi yang ditawarkan dari proposal ini untuk mengatasi masalah-masalah yang selama ini timbul dari sistem akuntansi keuangan daerah yaitu :

1. Menyajikan laporan keuangan daerah tanpa syarat dan *asset management* yang mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.
2. *Software* sistem dibuat berbasis web sehingga dapat diakses melalui internet.
3. Pengembangan *software* menggunakan metode *object oriented* (*software* akuntansi keuangan daerah) dan metode *incremental* (*software* web publikasi).
4. Mengurangi penggunaan media kertas (*paper less*).
5. Membantu ketidaktersediaan sumber daya manusia (SDM) akuntansi yang cukup di Pemda.
6. mengurangi item biaya pembelian *software* komersial dengan menggunakan *software open source*.
7. Meminimalkan *human error*.
8. Efisiensi waktu.

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama atau *key performance indicator* (KPI) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proyek SIMAKDA terhadap sasaran organisasi, antara lain :

1. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan laporan keuangan maksimal 1 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran.
2. Laporan keuangan dapat diterima 100 % tanpa syarat dalam 2 tahun.
3. Jumlah temuan audit internal < 10.
4. Jumlah waktu yang dibutuhkan sejak terbitnya laporan keuangan yang disetujui, dan rinciannya untuk diketahui publik ≤ 7 hari.
5. Persentase berbagai laporan akuntansi dan keuangan tambahan diselesaikan tepat waktu ≥ 90%.

D. Ruang Lingkup Pekerjaan (*Scope of Work*)

Untuk menentukan ruang lingkup pekerjaan pada suatu proyek digunakan *framework ITPOSMO* agar semua pekerjaan terdefinisi sejak awal dan tidak ada yang terlewat. Aspek yang dibahas pada pada penelitian ini hanya pada aspek informasi, teknologi, proses, staf, dan manajemen karena telah dianggap mewakili aspek yang lainnya.

1. Informasi
   Proyek SIMAKDA ini menghasilkan informasi keuangan daerah yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan, pengendalian keuangan pemerintah (aset, hutang, dan ekuitas dana), seperti:
   a. Laporan SKPD meliputi: Neraca Daerah, Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Daerah sebelum konversi, LRA Daerah setelah konversi, Neraca saldo, Buku Besar dan Laporan Jurnal.

b. Laporan SKPD meliputi: Neraca SKPD, LRA SKPD sebelum konversi, LRA setelah konversi, Neraca Saldo, Buku Besar dan Laporan Jurnal.

c. Laporan Pendukung meliputi: Laporan Semester, Laporan Buku Besar (BB) per kegiatan, Laporan BB belanja Pemda, Laporan Buku Bantu Kas Penerimaan dan Pengeluaran, Laporan Triwulan dan Laporan per Sub Dinas.

d. *Language* (SQL) untuk mengeluarkan data-data dari sistem melalui script SQL.

Interface ini penting karena auditor umumnya meminta data-data pendukung yang belum tersedia di menu laporan sehingga dapat dikeluarkan melalui perintah SQL.

Pekerjaaan yang akan dilakukan untuk menghasilkan informasi tersebut, antara lain:

1) Pengembangan format data dan *template* laporan dari kecamatan dan SKPD.
2) Pengembangan format laporan data daerah.
3) Pengembangan susunan direktori.

2. Teknologi

Teknologi yang digunakan untuk membangun sistem informasi akuntansi keuangan daerah Kabupaten Banjar, Kalimantan timur secara garis besar dapat dibagi ke dalam beberapa bagian berikut:

a. Keamanan infrastruktur Intranet.
b. Sistem operasi *server* untuk *file server*.
c. Jaringan Internet.
d. Keamanan aplikasi penayangan data.

Pekerjaaan yang akan dilakukan untuk menghasilkan teknologi tersebut, antara lain:

1) Membuat aplikasi dekstop dan website
2) Desain Intranet, tender pembangunan Intranet, pengadaan *server*, *software*, dan *peripheral* jaringan dan uninterruptible power supply (UPS), instalasi *server* dan perangkat.
3) Langganan *bandwith* Internet, desain keamanan aplikasi penayangan data dan tender pengembangan aplikasi penayangan data.

3. Proses

Deliverable yang berkaitan dengan proses untuk menghasilkan informasi keuangan daerah meliputi: penyajian laporan keuangan daerah kepada publik melalui web, pengaturan grup untuk mengatur hak akses terhadap modul, *Standar Operasional Procedure* (SOP) pengiriman laporan, SOP untuk penayangan data dan Surat Keputusan (SK) Bupati untuk kewajiban mengirim laporan elektronik secara periodik.

Pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan proses adalah pengembangan SOP, merancang *user*, *group user* dan hak akses group, melakukan replikasi database ke *web server*, melakukan *testing* unit menyeluruh dan *stress testing* dan diskusi group terkait SK Bupati.

4. Staf dan keahlian

Dalam mengelola keuangan daerah harus memiliki staf yang terlatih untuk menggunakan sistem operasi

server, mengirim laporan, menayangkan data, memelihara jaringan dan sebagai administrator *server*. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan-pelatihan seperti pelatihan sistem operasi *server*, pelatihan pengiriman laporan, pelatihan penayangan data, pelatihan pemeliharaan jaringan dan pelatihan sebagai administrator *server*.

5. Sistem Manajemen dan struktur
   Agar proyek SIMAKDA dapat diimplementasikan maka dibutuhkan dukungan dari manajemen berupa kerjasama dengan dinas-dinas lain dan Bank, seminar sosialisasi untuk eksekutif dan leaflet untuk masyarakat. Pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperoleh dukungan dari manajemen adalah membuat *memorandum of understanding* (MOU) dengan Bank, sosialisasi ke Ekeskutif Kecamatan dan SKPD dan Sosialisasi ke masyarakat untuk data daerah

E. Asumsi

Definisi proyek di atas dengan asumsi sebagai berikut:

1. Pemilik proyek, manajer proyek dan tim proyek sudah ditetapkan.
2. Anggota tim proyek adalah SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan proyek.
3. SDM sudah tersedia sesuai dengan spesifikasi dari proyek yang akan dikerjakan.
4. Untuk pemeliharaan di luar dari waktu yang telah ditetapkan maka dikenakan biaya perawatan.
5. Untuk kerusakan dari sisi infrastruktur jaringan merupakan tanggung jawab vendor dari perangkat tersebut.

4.2. Jadwal Proyek

Jadwal proyek disusun berdasarkan struktur rincian pekerjaan (*work breakdown structure*) yang berisikan daftar pekerjaan atau tugas-tugas yang akan dikerjakan dalam sebuah proyek. Untuk mengerjakan proyek pembangunan SIMAKDA ini diperlukan waktu untuk membangun sistem, ditambah 20 hari kerja untuk pendampingan dan 30 hari kerja untuk perawatan sistem serta 18 hari untuk persediaan waktu tambahan perubahan pekerjaan dan pertemuan. Total waktu yang disediakan untuk pembangunan proyek ini, mulai dari pembukaan proyek sampai penutupan proyek adalah 110 hari. Adapun rincian kegiatan proyek secara lengkap beserta durasi waktu yang diperlukan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Proyek SIMAKDA

WBS	GUGUS TUGAS (TASK) PROYEK	DURASI	TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI	PREDECESSOR
1	**Inisiasi Proyek dan Perencanaan Proyek**	18 hari	01/09/11	20/09/11	
1.1	**Membuat Project Charter**	hari	01/09/11	06/09/11	
1.1.1	Diskusi dengan pemilik proyek	1 day	01/09/11	01/09/11	
1.1.2	Diskusi dengan Tim Proyek	1 day	02/09/11	02/09/11	1.1.1
1.1.3	Dokumentasi Project Charter	2 hari	05/09/11	06/09/11	1.1.2
1.2	**Membuat Software Project Manajemen Plan (SPMP)**	14 hari	07/09/11	20/09/11	

1.2.1	Membuat Scope of Work	4 hari	07/09/11	09/09/11	1.1.3
1.2.2	Membuat Struktur Rincian Pekerjaan	5 hari	12/09/11	15/09/11	1.2.1
1.2.3	Membuat Jadwal Proyek	3 hari	16/09/11	20/09/11	1.2.2
1.2.4	Membuat Perencanaan Sumber Daya	2 hari	16/09/11	19/09/11	1.2.2
1.2.5	Membuat Rencana Anggaran Biaya	5 hari	16/09/11	20/09/11	1.2.2
1.2.6	Membuat Perencanaan Komunikasi	2 hari	16/09/11	19/09/11	1.2.2
1.2.7	Membuat Perencanaan Pengadaan	2 hari	16/09/11	19/09/11	1.2.2
1.2.8	Membuat Perencanaan Perubahan	2 hari	16/09/11	19/09/11	1.2.2
1.2.9	Membuat Perencanaan Risiko	2 hari	16/09/11	19/09/11	1.2.2
1.2.10	Membuat Perencanaan Kualitas	2 hari	16/09/11	19/09/11	1.2.2
2	**Analisa dan Desain**	19 hari	20/09/11	14/10/11	
2.1	**Membuat Software Requirement Spesification (SRS)**	13 hari	20/09/11	06/10/11	
2.1.1	Diskusi dengan Manajemen	1 day	20/09/11	20/09/11	1.2.10
2.1.2	Diskusi dengan User	1 day	21/09/11	21/09/11	2.1.1
2.1.3	Diskusi Menentukan Format Laporan dari SKPD	1 day	22/09/11	22/09/11	2.1.2

Tabel 1. Jadwal Proyek SIMAKDA (lanjutan)

WBS	GUGUS TUGAS (TASK) PROYEK	DURASI	TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI	PREDECESSOR
2.1.4	Membuat Activity Diagram Proses Bisnis	5 hari	23/09/11	29/09/11	2.1.3
2.1.5	Membuat Use Case Diagram	3 hari	30/09/11	04/10/11	2.1.4
2.1.6	Membuat Dokumentasi Analisa dan Desain Sistem	2 hari	05/10/11	06/10/11	2.1.5
2.2	**Membuat Software Design Description (SDD)**	16 hari	23/09/11	14/10/11	
2.2.1	Membuat ERD	3 hari	07/10/11	11/10/11	2.1.6
2.2.2	Membuat Class Diagram	3 hari	12/10/11	14/10/11	2.2.1
2.2.1	Membuat Activity Diagram Fungsional	3 hari	05/10/11	11/10/11	2.1.5
2.2.7	Membuat Desain Interface	2 hari	05/10/11	07/10/11	2.1.5
2.2.8	Membuat Struktur Navigasi	2 hari	05/10/11	06/10/11	2.1.5
2.2.9	Membuat Desain Web	3 hari	07/10/11	11/10/11	2.2.8
2.2.10	Membuat Desain Report	3 hari	23/09/11	27/09/11	2.1.3
2.2.11	Membuat Desain Arsitektur	2 hari	05/10/11	06/10/11	2.1.5
2.2.12	Membuat SOP Aplikasi SIMAKDA	2 hari	12/10/11	13/10/11	2.2.9
2.2.13	Dokumentasi Desain Software	3 hari	07/10/11	11/10/11	2.2.11
3	**Coding**	60 hari	12/10/11	03/01/12	

3.1	Coding Software Akuntansi	60 hari	12/10/11	03/01/12	2.2.13
3.2	Coding Software Web Publikasi	45 hari	12/10/11	13/12/11	2.2.13
3.3	Dokumentasi Program	3 hari	14/12/11	16/12/11	3.2
4	Testing Program	12 hari	19/12/11	03/01/12	
4.1	Melakukan Testing Unit	3 hari	19/12/11	21/12/11	3.3
4.2	Integrated & Performance Test	5 hari	22/12/11	28/12/11	4.1
4.3	Membuat Laporan Perbaikan	2 hari	29/12/11	30/12/11	4.2
4.4	Membuat Dokumentasi Testing Program	2 hari	02/01/12	03/01/12	4.3
5	**Pengadaan Infrastruktur (Computer Network + Other)**	28 hari	07/10/11	15/11/11	
5.1	Pengadaan Perangkat Keras	20 hari	07/10/11	03/11/11	2.2.11
5.2	Pengadaan Jaringan Intranet	20 hari	07/10/11	03/11/11	2.2.11
5.3	Pengadaan Internet	20 hari	07/10/11	03/11/11	2.2.11
5.4	Konfigurasi (Service + Security)	5 hari	04/11/11	10/11/11	5.3

Tabel 1. Jadwal Proyek SIMAKDA (lanjutan)

WBS	GUGUS TUGAS (TASK) PROYEK	DURASI	TANGGAL MULAI	TANGGAL SELESAI	PREDECESSOR
5.5	Performance Test	3 hari	11/11/11	15/11/11	5.4
6	**Deployment**	5 hari	16/11/11	21/11/11	
6.1	Konfigurasi Sistem	3 hari	16/11/11	17/11/11	5.1
6.2	Replikasi	2 hari	18/11/11	21/11/11	5.3
7	**Pelatihan SDM**	12 hari	11/11/11	25/11/11	
7.1	Pelatihan SysAdmin linux	3 hari	11/11/11	15/11/11	5.5
7.2	Pelatihan Network Administrator	3 hari	11/11/11	15/11/11	5.5
7.3	Pelatihan Web Master	3 hari	11/11/11	15/11/11	5.5
7.4	Pelatihan Database Administrator	3 hari	11/11/11	15/11/11	5.5
7.5	Pelatihan Pembuatan Report Generator	2 hari	11/11/11	14/11/11	5.5
7.6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi	4 hari	22/11/11	25/11/11	6.2
7.8	Pendampingan	20 hari	28/11/11	23/12/11	7.6
8	**Maintenance**	30 hari	28/11/11	06/01/12	7.6

4.3. Perencanaan Sumber Daya Manusia

Pada tahapan ini, Manajer Proyek mengidentifikasi kualifikasi dan jumlah personil yang dibutuhkan, mendokumentasikan peranan dan tanggung jawab seseorang dalam proyek (*roles and responsibility)* dan membuat

relasi pertanggungjawaban (berupa laporan,koordinasi atau kerja sama) tugasnya baik secara formal maupun informal. Kualifikasi dan jumlah personil yang dibutuhkan pada proyek SIMAKDA terdiri dari satu orang *Project Manager*, dua orang *System Analist*, satu orang *Database Designer*, dua orang *Java Dekstop Programmer*, dua orang *Web Developer*, satu orang *Web Designer,* satu orang *Dokumentasi,* satu orang *Form/Report Designer*, satu orang *Consultant Director*, satu orang *Chief Engineer*, satu orang *Quality Assurance,* satu orang *Technical Support* dan enam orang *Trainer*. Peran dan tanggung jawab masing-masing personel atau kelompok dengan mengacu pada form penugasan tim proyek (*project team assignment*).

4.4. Rencana Anggaran Belanja Proyek

Rencana anggaran belanja (RAB) proyek SIMAKDA dihitung berdasarkan *resources leveling* dengan tujuan agar dapat mengetahui waktu pelaksanaan proyek dan besarnya kebutuhan akan sumber daya tenaga kerja. *Resource leveling* dilakukan dengan bantuan program Ms. Project.

Tabel 2. Rencana Anggaran Belanja Proyek

Deskripsi Aktivitas Global	Jumlah Hari	Estimasi Biaya
Inisiasi Proyek dan Perencanaan Proyek	14 hari	Rp17.000.000
Analisa dan Desain	19 hari	Rp22.575.000
Coding	60 hari	Rp52.950.000
Testing Program	12 hari	Rp8.575.000
Pengadaan Infrastruktur (Computer Network + Other)	28 hari	Rp128.950.000
Deployment	4 hari	Rp2.700.000
Pelatihan SDM	11 hari	Rp6.150.000
Pendampingan	20 hari	Rp7.000.000
Maintenance	30 hari	Rp13.500.000
Biaya Cetak Dokumentasi		Rp21.000.000
Biaya Cadangan Operasional		Rp30.000.000
Biaya Cadangan Tidak Terduga		Rp20.000.000
Total Biaya		**Rp330.400.000**

4.5. Perencanaan Pengadaan

Manajer proyek membuat perencanaan pengadaan barang yang menjabarkan barang yang dibutuhkan, waktu suatu barang dibutuhkan, dan proses pengadaan. Prosedur pengadaan

barang pada proyek pemerintah dimulai dari proses mengajukan *request for proposal* dan *request for quote* kepada vendor. Kemudian vendor mengirim surat penawaran harga. Selanjutnya diadakan diskusi untuk menentukan vendor yang memberikan penawaran barang dengan kualitas baik dan harga rendah. Vendor yang terpilih akan dipanggil untuk mengikuti tes kelayakan vendor. Apabila dinilai layak maka dibuat berita acara pemesanan barang sesuai dengan spesifikasi barang dan waktu yang seperti yang tercantum pada kontrak kerjasama.

4.6. Perencanaan Komunikasi

Perencanaan komunikasi menjabarkan kebutuhan komunikasi reguler antar anggota tim yang terlibat dalam pengerjaan proyek SIMAKDA. Perencanaan komunikasi meliputi kegiatan pertemuan dan pelaporan. Persiapan yang harus dilakukan sebelum dilaksanakan pertemuan, antara lain:

1. Mendistribusikan agenda pertemuan, selambat-lambatnya sehari sebelumnya. Pembahasan topik berdasarkan urutan kepentingan, dimulai dengan topik yang mudah dan setiap topik diberikan alokasi waktu.
1. Setiap modifikasi yang telah disetujui, ataupun perubahan pada jadwal dan biaya proyek harus mengacu pada prosedur berikutnya.
2. Pengajuan perubahan dapat berasal dari setiap anggota tim apabila diperlukan, terutama untuk perubahan yang akan mempengaruhi jadwal dan ruang kerja.
3. Persetujuan pada form permintaan perubahan atau *changes request form* (CRF) menunjukkan persetujuan terhadap perubahan pada jadwal.

Sedangkan prosedur pengajuan perubahan, sebagai berikut:

1. Suatu perubahan dapat diajukan ke manajer proyek melalui komunikasi formal (pertemuan reguler) ataupun non fomal (melalui bentuk komunikasi lainnya).
2. Mengisi CRF sebagai usulan perubahan.

Setelah perubahan diajukan ke manajer proyek, perubahan pekerjaan dapat dimulai. Manajer proyek akan

2. Mendistribusikan materi pertemuan, agenda serta informasi lokasi dan waktu.
3. Setiap anggota tim proyek bertanggung jawab untuk melakukan persiapan, hadir dan berpartisipasi aktif dalam pertemuan.
4. Pemimpin pertemuan dan fasilitator memastikan pertemuan dapat berjalan pada jalurnya dan efektif, sehingga tujuan pertemuan dapat tercapai.
5. Pemimpin pertemuan menunjuk seseorang sebagai notulen untuk membuat dokumentasi pertemuan dan mendistribusikannya dengan tepat.
6. Pada saat pertemuan membahas kemajuan proyek, aktivitas yang akan segera dilakukan dan pembahasan ulang kontrol perubahan (*change control review*).

4.7. Perencanaan Perubahan

Dalam suatu proyek, ada kemungkinan terjadinya permintaan perubahan. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka pelu disusun suatu prosedur. Prosedur untuk mengontrol perubahan dalam suatu proyek (*changes control procedure*), adalah:

mengubah jadwal proyek atau rencana kerja untuk mengakomodasi perubahan yang telah disetujui dan mempresentasikannya dalam pertemuan kemajuan proyek untuk disetujui. Selanjutnya, manajer proyek akan menandatangani CRF apabila perubahan telah selesai dilakukan.

Manajer proyek mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dan merencanakan strategi untuk menangani risiko tersebut. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko dapat menggunakan *framework* COBIT 4.1. Tabel 3 menunjukkan strategi yang mungkin untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin terjadi.

4.8. Perencanaan Risiko

Tabel 3. Hasil Analisis Risiko Proyek SIMAKDA

No	Risiko	Frekuensi	Dampak	Strategi Untuk Mengantisipasi Risiko
1.	Interoperabilitas dengan sistem lain untuk mendapatkan informasi bisnis menjadi lebih sulit	Rendah	Tinggi	Mengusulkan membuat IT Plan dan dikerjakan oleh Ttm proyek untuk kemudahan integrasi
2.	SDM tidak memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi	Rendah	Tinggi	Pemilihan SDM yang memenuhi kualifikasi dan memiliki keinginan untuk belajar yang tinggi
3.	Umumnya terdapat Resistensi terhadap sistem baru	Rendah	Tinggi	Dikeluarkan SK disertai dengan *job description* yang rinci
4.	Kesenjangan yang terlalu tinggi antara SDM & sistem	Rendah	Tinggi	Menawarkan masa pendampingan diperpanjang dengan dikenakan biaya tambahan
5.	Tidak ada standar harga yang jelas, terutama untuk *software* khusus aplikasi sehingga cenderung menjadi sasaran auditor	Rendah	Tinggi	Kontrak harus dikonsultasikan kepada auditor
6.	Poses pelelangan lama dan mungkin terjadi pemenang dengan harga rendah tapi kualitas rendah	Tinggi	Sedang	Harus dibuat standar pemenang dengan kualitas tinggi
7.	Database yang digunakan pada sistem tidak dapat memproses transaksi per detik sebanyak yang diharapkan	Sedang	Tinggi	Melakukan tuning pada database setiap periode entri
8.	Data hilang akibat usia peralatan atau faktor lain	Tinggi	Tinggi	Disiapkan back up online, penyediaan *hardware* cadangan dan SOP

Tabel 3. Hasil Analisis Risiko Proyek SIMAKDA

No	Risiko	Frekuensi	Dampak	Strategi Untuk Mengantisipasi Risiko
9.	Staf sakit pada saat-saat kritis proyek	Sedang	Tinggi	mengorganisasi ulang tim proyek yaitu dengan memberdayakan SDM yang intensitas pekerjaan sudah menurun
10.	Infrastruktur jaringan tidak berfungsi dengan baik dan laporan keuangan terlambat akibat data belum dientri	Sedang	Tinggi	Dilakukan pemeriksaan secara teratur dari infrastruktur dan Monitoring data yang sudah diproses

4.9. Perencanaan Kualitas

Untuk menjamin kualitas produk yang akan dihasilkan maka manajer proyek melakukan perencanaan kualitas, meliputi: Mengidentifikasi dan mengkomunikasikan kriteria kualitas dengan para *stakeholders*.

a. Mengembangkan dan mengkomunikasikan persyaratan-persyaratan kualitas dengan para *stakeholders*.
b. Membuat daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek berupa *quality checklist*.

Pada tahap pelaksanaan proyek, Manajer proyek mereview sistem pengelolaan kualitas dan dimodifikasi secara terus menerus dengan cara : menentukan objek pengontrolan, Menentukan unit yang akan diukur, (dianalisis), menentukan *performance yang* optimal dari proses pekerjaan yang telah dilakukan, mengembangkan ide untuk meminimalisir akar, penyebab permasalahan, mengoptimalkan penggunaan *tools* yang diperlukan dalam melakukan peningkatan mutu, menciptakan peluang-peluang dan kesempatan untuk peningkatan mutu.

5. KESIMPULAN

Proses perencanaan manajemen proyek SIMAKDA memperhatikan batasan-batasan seperti ruang lingkup pekerjaan, jadwal proyek dan anggaran biaya. Untuk menentukan ruang lingkup pekerjaan pada suatu proyek digunakan *framework ITPOSMO* agar semua pekerjaan terdefinisi sejak awal dan tidak ada yang terlewat. Selain itu, Manajer Proyek juga membuat perencanaan meliputi: perencanaan kebutuhan SDM, perencanaan pengadaan infrastruktur TI, perencanaan kebutuhan komunikasi, perencanaan perubahan dan perencanaan risiko untuk mengendalikan pelaksanaan proyek sehingga proyek dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan budget yang telah ditentukan dan Sistem Informasi keuangan Daerah dapat dimplementasikan dengan baik. Penerapan SIMAKDA diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan daerah sehingga pembangunan daerah berjalan dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah Banjar, Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Bahrullah. 2002. Fungsi Manajemen Keuangan. Boklet Publikasi BPK, No.87 Bulan Oktober. Jakarta: BPK..

Arief, Muhammad. 2008. Kesenjangan: Faktor Utama Penyebab Kegagalan Proyek E-Government. e-Indonesia Initiative 2008 (eII2008) Konferensi dan Temu Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia 21-23 Mei 2008, Jakarta. [http://iatt.kemenperin.go.id/tik/fullpaper/fullpaper26_Muhammad_Arief_BPPT.pdf]. (diakses tanggal 1 Desember 2011).

Davidson, Jeff. 2002. Manajemen Proyek : Menguasai Keahlian Yang Anda Perlukan Dalam 10 Menit. Yogyakarta : Andi.

Hafiz Tanjung, Abdul. 2009. Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan). http://www3.hafizkonsultan.com/artikel/file_artikel/Sistem%20Akuntansi%20Keuangan%20Daerah.pdf]. (diakses tanggal 1 Desember 2011).

Haryono, Kholid.2011. Pengembangan Sistem Informasi Akuntansi Daerah Yang Berorientasi Pada KemandirianAudit. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi h.123-128.[journal.uii.ac.id/index.php/Snati/article/view/2184/2010]. (di akses tanggal 27 November 2011).

Heryanto, Imam dan Totok Triwibowo. 2009. Manajemen Proyek Berbasis Teknologi Informasi : Mengelola Proyek Secara Sistematis Menggunakan Microsoft Project. Jakarta : Informatika.

Heeks, Richard. 2003. Most eGovernment-for-Development Projects Fail: How Can Risks be Reduced?. Institute for Development Policy and Management. [http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/NISPAcee/UNPAN015488.pdf]. (diakses tanggal 1 Desember 2011).

Rahmad, Muhammad dan Zaitun A. B. 2008. Studi Kasus Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada UKM Dengan Sumber Daya Terbatas. . e-Indonesia Initiative 2008 (eII2008) Konferensi dan Temu Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia 21-23 Mei 2008, Jakarta. [http://iatt.kemenperin.go.id/tik/fullpaper/fullpaper237_Muhammad_Rahmad.pdf]. (diakses tanggal 5 Desember 2011).

Standish Group. 1995. The Chaos Report 1995. United States : The Standish Group International, Inc. [www.projectsmart.co.uk/docs/chaos-report.pdf]. (diakses tanggal 5 Desember 2011).